

BANTUAN LANGSUNG TUNAI EL NINO



Petugas menyalurkan BLT BBM dan BPNT kepada seorang lansia di Kantor Pos Malang.

ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

Pemerintah menyiapkan Rp7,52 triliun dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengatasi dampak El Nino di Indonesia. El Nino menyebabkan panas berkepanjangan hingga berujung pada kekeringan dan gagal panen. Dana triliunan itu nantinya akan dibagikan kepada 18,8 juta warga miskin di seluruh Indonesia.

Masyarakat yang ingin mendapatkan BLT El Nino tidak bisa mengajukan diri. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan data penerima bantuan akan diambil dari data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah dimiliki Kementerian Sosial. Data ini sama dengan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Nantinya setiap keluarga akan memperoleh Rp200.000,00 per bulan masing-masing sepanjang November dan Desember 2023, sehingga totalnya setiap KPM mendapatkan Rp400.000,00. Cara menerima bantuan ini adalah melalui transfer ke rekening masing-masing penerima.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap Kementerian Sosial (Kemensos) dapat mengeksekusi bantuan tunai untuk 18.8 juta KPM yang sudah ada daftar nama, alamat dan nomor *accountnya*.

Di tempat dan waktu berbeda, Presiden Joko Widodo menjelaskan bantuan tersebut diberikan untuk menghadapi dampak potensial dari pergantian musim kemarau ke musim

hujan. Dikhawatirkan badai El Nino dapat mengurangi daya beli masyarakat serta produksi beras.

Masyarakat dapat mengecek dahulu apakah dirinya masuk dalam daftar penerima BLT. Caranya dengan mengunjungi laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id ataupun melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos. Laman dan aplikasi tersebut dapat menampilkan daftar penerima BLT yang termasuk dalam KPM.

Sumber Berita:

1. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20231025174659-33-483691/pemerintah-siapkan-blt-el-nino-seorang-dapat-rp200-ribu>, Rabu 25 Oktober 2023
2. <https://www.suara.com/bisnis/2023/10/26/125912/kapan-blt-el-nino-cair-ini-syarat-mengajukan-dan-ketentuan-penerima>, Kamis, 26 Oktober 2023
3. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231026075024-4-483784/jokowi-bagikan-blt-el-nino-rp-200-ribu-cair-kapan>, Kamis, 26 Oktober 2023
4. <https://nasional.tempo.co/read/1788935/5-jenis-blt-dari-pemerintah-ada-blt-el-nino-hingga-covid-19>, Kamis, 26 Oktober 2023
5. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231025175107-532-1015920/sri-mulyani-kucurkan-rp752-t-untuk-blt-el-nino>, Kamis, 26 Oktober 2023
6. <https://www.kompas.tv/nasional/455305/jokowi-pemerintah-akan-bagikan-blt-el-nino-hingga-desember-2-kali-cair-total-rp400-ribu>, Kamis, 26 Oktober 2023
7. <https://money.kompas.com/read/2023/10/26/070800826/respons-dampak-el-nino-pemerintah-tambah-bansos-beras-dan-bagikan-blt-rp>, Kamis, 26 Oktober 2023

Catatan:

Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino merupakan salah satu BLT yang diberikan oleh Pemerintah. Data penerima BLT El Nino sama dengan data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan. Penyaluran bantuan sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu,

dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Kriteria ketiga komponen tersebut, yaitu :

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - a. ibu hamil/menyusui; dan
 - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

KPM PKH berhak mendapatkan :

1. bantuan sosial PKH;
2. pendampingan PKH;
3. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
4. program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Penetapan KPM PKH yaitu :

1. Penetapan KPM PKH berdasarkan hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau pemutakhiran data.
2. Penetapan KPM PKH melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Penyaluran bantuan sosial PKH yaitu :

1. Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan secara nontunai.
2. Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi bantuan sosial PKH dari setiap penyaluran bantuan sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
3. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

Nilai bantuan sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen bantuan sosial PKH. Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara nontunai meliputi:

1. pembukaan rekening penerima bantuan sosial PKH;
2. sosialisasi dan edukasi;
3. distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;
4. proses penyaluran bantuan sosial PKH;
5. penarikan dana bantuan sosial PKH;
6. rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH; dan
7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial PKH.